

**Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan
Keuangan**

*(Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2017)*

Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

RAHMAT RIANDI

NIM/ TM: 14043079/ 2014

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

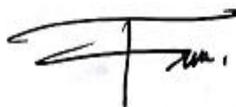
**Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan
Keuangan**
*(Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2017)*

Nama : Rahmat Riandi
NIM/TM : 14043079/2014
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 1 Februari 2019

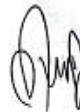
Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP 19730213 199903 1 003

Dosen Pembimbing Skripsi



Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19720910 199802 2 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

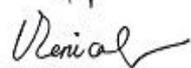
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Judul : Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian
Kembali Laporan Keuangan (*Studi Empiris pada
Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2017*)

Nama : Rahmat Riandi
NIM/TM : 14043079/2014
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, 13 Februari 2019

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak	1. 
2. Sekretaris	Vanica Serly, S.Pd, M.Si	2. 
3. Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Riandi
NIM/Tahun Masuk : 14043079/2014
Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 15 November 1993
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Tanjung Aur RT/RW 002/004, Kel. Balai Gadang Koto Kec.
Koto Tengah
No. HP/Telp : 082284575946/ 085274970317
Judul Skripsi : Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2017*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 6 Februari 2019



Rahmat Riandi
14043079/2014

ABSTRACT

Rahmat Riandi, 14043079/ 2014 "Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2017*)"

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

Dosen Pembimbing : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

This research aims to find empirical evidence regarding the relationship between the measurements of fair value with restatement. The population in this research is the entire financial sector companies were listed on the Indonesia stock exchange (BEI) in 2014-2017. The testing in this research was conducted using binomial logistic regression. The result shows that the fair value measurements does not affect accounting restatement. Size and leverage does not affect a restatement. For further research could consider the sample by comparing the measurement of fair value on financial firms with non-financial companies. For further research could use other variables that might affect a restatement.

Keywords: *fair value measurement; accounting restatement; logistic regression analysis*

ABSTRAK

Rahmat Riandi, 14043079/ 2014 "Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2017*)"

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

Dosen Pembimbing : Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai hubungan antara pengukuran nilai wajar dengan penyajian kembali. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi logistik binomial. Hasilnya menunjukkan bahwa pengukuran nilai wajar tidak mempengaruhi penyajian kembali akuntansi. Ukuran dan leverage tidak memengaruhi penyajian kembali. Untuk penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan sampel dengan membandingkan pengukuran nilai wajar pada perusahaan keuangan dengan perusahaan non-keuangan. Untuk penelitian lebih lanjut dapat menggunakan variabel lain yang mungkin mempengaruhi penyajian kembali.

Kata kunci: *pengukuran nilai wajar; penyajian kembali laporan keuangan; analisis regresi logistik*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Alloh SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Hubungan Pengukuran Nilai Wajar dan Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Studi Empiris pada Seluruh Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2017*)**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program S-1 serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak selaku dosen pembimbing dan pembimbing akademik peneliti yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dan bersabar dalam mendidik dan mengajar serta memotivasi peneliti selama proses kuliah. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam rangka penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Dosen penguji peneliti Ibu Vanica Serly, S.Pd, M.Si dan Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
4. Ibu dan Bapak staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang terutama jurusan akuntansi serta para karyawan yang telah

membantu peneliti selama proses kuliah di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tua peneliti yang peneliti cintai dan sayangi dunia sampai akhirat, Bapak Asril dan Ibu Khadijah yang telah memberikan semuanya dan tidak akan pernah bisa peneliti balas walaupun dengan semua prestasi yang pernah dan yang akan peneliti raih nanti.
6. Untuk adik-adik penulis yang "~~kareheang~~" dan peneliti sayangi, Ridho Putra, Wulan Triyani dan Nurul Aini yang telah memberikan warna selama peneliti menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk semua keluarga besar dari pihak Ayah dan pihak Ibu yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk Ayah dan Ama, untuk Bang Bayu dan Elok serta rani, wawa dan Ozi, untuk Bang Is, untuk Bang Beni, untuk Da Im dan Kak Dede serta puti, untuk Da Yaih dan Kak Ita, untuk Uniang dan Bang Pen serta Aya, Ibam dan Imam, untuk Pak Miza dan Tek Wid serta zhezhe dan sabil,
8. Untuk rido irmas "*godog*" yang selalu ada, untuk sutan pandilon "*ambassador*" yang sudah mamotoan contoh skripsi (*nyo request iko di kata pengantar wak*), untuk purnama kukuh "*sutradara film*", untuk randi "*datuak*" gustian, untuk ravi "*mandan sering kalah*", untuk gusti "*da boy*", untuk sabran "*cantik*", untuk andri "*santai*", untuk memet "*selow*" (*ansua-ansua juo lah skripsi tu met*), untuk adel "*karak*", untuk bagus "*bencong*" (*ehh teman magang wak, maksudnyo*), untuk idil

"gambuang", untuk bima "ketek" dan bima "gadang", dan untuk teman-teman jurusan akuntansi BP 14, 15, 16 yang menemani peneliti selama proses kuliah, untuk *uda-uda tukang angkek di jalan By Pass KM 19*, untuk ipan "uncu", untuk andra "godog", untuk aulia Rahim "ayaaaaaaaaaaa" dan untuk...

9. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Namun, apabila terdapat kekurangan maka penulis menerima setiap kritik dan saran dari pembaca demi kemajuan ilmu pengetahuan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2019

Rahmat Riandi
14043079/ 2014

DAFTAR ISI

<i>ABSTRACT</i>	i
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1) Bagi Peneliti	11
2) Bagi Praktisi	11
3) Bagi Akademisi	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori	12
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	12
2. Kualitas Pelaporan Keuangan (<i>Financial Reporting Quality</i>)	15
3. Penyajian Kembali Laporan Keuangan (<i>Restatement</i>)	20
4. Akuntansi Nilai Wajar (<i>Fair Value Accounting</i>)	30
B. Penelitian Terdahulu	34
C. Pengembangan Hipotesis	36
D. Kerangka Konseptual	41
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Metode Pengumpulan Data	45

Tabel 1. Pengambilan sampel	45
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	45
1) Variabel Dependen (Y)	45
2) Variabel Independen (X).....	46
3) Variabel Kontrol.....	47
F. Metode Analisis.....	47
1) Statistik Deskriptif	47
2) Analisis Regresi Statistik Inferensial.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia	53
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	54
1. Penyajian kembali akuntansi (<i>restatement</i>)	55
Tabel 2. Daftar sampel penelitian	55
2. Aset Perusahaan yang diukur dengan Nilai Wajar	57
Tabel 3. Aset nilai wajar (<i>fair value asset</i>).....	57
3. Liabilitas Perusahaan yang diukur dengan Nilai Wajar	59
Tabel 4. Liabilitas nilai wajar (<i>fair value liabilities</i>)	59
4. <i>SIZE</i> dan <i>LEVERAGE</i>	60
Tabel 5. Variabel Kontrol Penelitian	60
C. Analisis Deskriptif	62
Tabel 6. Statistik Deskriptif	62
D. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik.....	63
Tabel 7. <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	63
Tabel 8. <i>Uji -2 Log Likelihood Value Block Number = 0 (Beginning Block)</i>	64
Tabel 9. <i>Uji -2 Log Likelihood Value Block 1: Method = Enter</i>	64
Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (<i>Model Summary</i>)	66
Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik	67
E. Pengujian Hipotesis Penelitian.....	69
1. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1).....	69
2. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2).....	70
3. Pengujian Hipotesis Kedua (H_3).....	70

F.	Pembahasan.....	70
1.	Pengaruh pengukuran aset nilai wajar (<i>fair value aset measurements</i>) terhadap keterjadian <i>restatement</i>.....	71
2.	Pengaruh pengukuran liabilitas nilai wajar (<i>fair value liabilities measurements</i>) terhadap keterjadian <i>restatement</i>.....	73
BAB V PENUTUP		76
A.	KESIMPULAN.....	76
B.	KETERBATASAN	77
C.	SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengambilan Sampel.....	47
Tabel 2. Daftar sampel penelitian	57
Tabel 3. Aset nilai wajar (<i>fair value asset</i>)	59
Tabel 4. Liabilitas nilai wajar (<i>fair value liabilities</i>)	61
Tabel 5. Variabel Kontrol Penelitian	63
Tabel 6. Statistik Deskriptif	65
Tabel 7. <i>Hosmer and Lemeshow Test</i>	66
Tabel 8. <i>Uji -2 Log Likelihood Value Block Number = 0 (Begining Block)</i>	67
Tabel 9. <i>Uji -2 Log Likelihood Value Block 1: Method = Enter</i>	67
Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (<i>Model Summary</i>)	69
Tabel 11. Hasil Uji Analisis Regresi Logistik	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian.....	43
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara (Suwardjono, 2005). Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelapor kepada investor sekarang dan investor potensial serta pemberi pinjaman dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (IAI, 2016). Untuk menilai kualitas teknologi laporan keuangan dapat dilihat dari kemampuan teknologi laporan keuangan tersebut dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan.

Kebermanfaatan (*usefulness*) merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi (Suwardjono, 2005). Pada Bab 3 didalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dijelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan. Karakteristik kualitatif utama (*primary qualitative characteristics*) laporan keuangan terdiri dari relevan (*relevance*) dan representasi tepat (*faithful representation*). Sementara itu, karakteristik kualitatif peningkatan (*enhancing qualitative characteristics*) laporan keuangan terdiri dari terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpaham (*understandable*).

Relevan (*relevance*) dapat diartikan dengan kemampuan informasi yang terdapat didalam laporan keuangan dalam mempengaruhi proses pemilihan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. (Suwardjono, 2005) mendefinisikan relevan (*relevance*) dengan kemampuan informasi keuangan pada laporan keuangan untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan (*outcomes*) dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi atau mengkoreksi harapan-harapannya.

Sementara itu, representasi tepat (*faithful representation*) dapat diartikan dengan penyajian informasi keuangan didalam laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan keadaan ekonomis dari subjek laporan keuangan tersebut. (Suwardjono, 2005) mendefinisikan representasi tepat (*faithful representation*) dengan kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi (representasi) dan fenomena yang diukur atau dideskripsi. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasi adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut.

Dalam menyusun, menyiapkan, dan menyajikan laporan keuangan dibutuhkan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun, dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan masih memungkinkan terjadinya kelalaian untuk

mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya. Kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan (*oversights*) atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan (**PSAK No. 25**) yang mengharuskan untuk dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan (*restatements*). Berdasarkan teori keagenan, informasi yang disajikan oleh manajemen (*agent*) dalam laporan keuangan memungkinkan untuk menyesatkan atau dimanipulasi sehingga merugikan *principal* (pemilik) dan pihak-pihak lain yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Sementara itu, standar akuntansi juga memberi keleluasaan (*discretion*) bagi badan usaha untuk memilih perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi badan usaha (**Suwardjono, 2005**). **Lin et al., (2017)** menemukan bahwa beberapa penyajian kembali cenderung dikaitkan dengan kompleksitas transaksi, manipulasi yang disengaja serta pengukuran nilai wajar level 3.

Penelitian (**Lin et al., 2017**) menemukan bahwa keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*) diasosiasikan dengan aset nilai wajar level 3. **Wang (2010)** juga memberikan bukti mengenai pengukuran nilai wajar yang berpengaruh terhadap perilaku oportunistik dalam hal penilaian aset antara manajer dan penilai (*verifier*). Pengukuran nilai wajar merupakan pengukuran yang berbasis pasar. Namun, tidak semua aset dan liabilitas mempunyai pasar sebagai pembanding dalam hal pengukuran pada laporan keuangan yang kemungkinan besar mempengaruhi penyajian kembali akuntansi (*restatement*). Penelitian ini termotivasi oleh penemuan **Lin et al., (2017)** tentang asosiasi antara pengukuran

nilai wajar aset level 3 dengan keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*).

Pengadopsian standar akuntansi internasional (IFRS) secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia. Dengan adanya pengadopsian penuh IFRS di Indonesia diharapkan terjadinya perbaikan dalam kualitas informasi akuntansi (**Sianipar dan Marsono: 2013**). Selain itu, secara teoritis konvergensi IFRS diharapkan mampu mengurangi praktik manajemen laba yang dilakukan perusahaan (**Cahyati: 2011**). Dengan mengadopsi IFRS berarti laporan keuangan berbicara dengan menggunakan bahasa akuntansi yang sama, hal ini akan meningkatkan kualitas pelaporan manajemen dan pengambilan keputusan serta meningkatkan kepastian dan konsistensi dalam interpretasi akuntansi, sehingga memudahkan proses akuisisi dan divestasi (**Gamayuni: 2009**).

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dibutuhkan keputusan pengukuran yang berdampak pada output karakteristik kualitatif informasi. Kunci utama pengukuran nilai wajar adalah kondisi pasar aktif dan tidak aktif. Dalam kondisi pasar aktif, informasi yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas relevan, reliabel, dapat dibandingkan dan konsistensi. Ketika kondisi pasar tidak aktif, informasi yang disajikan menjadi tidak *fair*, kurang memenuhi kriteria relevan dan reliabel. Komparabilitas juga terganggu karena kemungkinan penggunaan teknik penilaian estimasi input yang berbeda namun tetap dapat memenuhi kualitas konsistensi dengan adanya pengungkapan. Pengukuran ini juga dapat menyebabkan nilai aset menurun dalam kondisi pasar tidak aktif sehingga perlu

pertimbangan *cost and benefit* serta materialitas dalam pertimbangan pengambilan keputusan (Sonoto, 2010).

Standar IFRS yang berbasis prinsip dan menekankan pengungkapan lebih banyak informasi keuangan serta pengukuran dengan menggunakan nilai wajar (*fair value*) dianggap lebih bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan investasi bagi investor sekarang serta investor potensial. **PSAK No. 68** Pengukuran Nilai Wajar mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran yang spesifik atas entitas. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi pertukaran terjadi dalam suatu transaksi teratur (*orderly transaction*) di pasar utama (*principal market*), atau jika tidak ada, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) (**PSAK No. 68**).

PSAK 68 juga menetapkan hierarki nilai wajar yang mengkategorikan input kedalam tiga level. Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan (**level 1**) dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi (**level 3**). Input tersebut dikategorikan dalam tiga level hierarki nilai wajar, yaitu: (1) **Input Level 1**, yaitu harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Penekanan pada level 1 adalah untuk menentukan kedua hal sebagai berikut: (i) pasar utama atau jika tidak ada pasar yang paling menguntungkan; dan (ii)

executable (transaksi dapat dilakukan pada harga tersebut pada tanggal pengukuran). Contohnya: harga saham di bursa saham. (2) **Input Level 2**, yaitu input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya: (i) swap suku bunga *received-fixed, pay-variable* berdasarkan: [suku bunga swap antar bank (LIBOR), kurva imbal hasil yang didenominasi dalam mata uang asing, tingkat bunga prima bank yang spesifik]; (ii) opsi tiga tahun atas saham yang diperdagangkan; (iii) perjanjian lisensi; (iv) persediaan barang jadi di gerai ritel; dll. (3) **Input Level 3**, yaitu input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Contohnya: (i) *long-dated currency swap*; (ii) opsi tiga tahun atas saham yang diperdagangkan (volatilitas historis); (iii) swap suku bunga (tidak mengikat); (iv) liabilitas aktivitas purnaoperasi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis; dan (v) unit penghasil kas: perkiraan keuangan contohnya (arus kas atau laba rugi) yang dikembangkan menggunakan data milik entitas sendiri.

Dalam hal pengukuran untuk nilai wajar aset nonkeuangan, memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Hal ini memperhitungkan penggunaan yang secara fisik dimungkinkan (*physically possible*), secara hukum diizinkan (*legally permissible*), dan layak secara keuangan (*financially feasible*). Penggunaan tertinggi dan terbaik juga

menetapkan premis penilaian (*valuation premise*), yang digunakan untuk mengukur nilai wajar (**PSAK No. 68**).

Dari sudut pandang teoritis, nilai wajar diyakini lebih relevan daripada pendekatan biaya historis, karena nilai wajar lebih mencerminkan arus kas ekspektasi risiko yang sesuai dengan ekspektasi investor dan lebih tepat daripada pendekatan biaya historis. Di satu sisi, akuntansi nilai wajar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memberikan informasi harga yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan bagi investor (**Song et al., 2010; Cristea, 2015**). **Edvandini et al., (2014)** menemukan bahwa terjadi peningkatan kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri informasi mengalami penurunan setelah adopsi IFRS. Selain itu, (**Liensmeier: 2011**) mengemukakan bahwa akuntansi nilai wajar paling berkorelasi dengan eksposur bank terhadap suku bunga dan risiko kredit serta lebih baik dalam mencerminkan kinerja dan kondisi lembaga keuangan.

Di sisi lain, akuntansi nilai wajar sebagian besar bergantung pada kebijaksanaan manajerial yang dapat mengurangi kualitas pelaporan keuangan (**Du et al., 2014; Lin et al., 2017**). **Wang (2010)** juga memberikan bukti mengenai pengaruh akuntansi nilai wajar terhadap perilaku oportunistik didalam proses penilaian aset antara manajer dengan penilai (*verifier*).

Lin et al., (2017) menemukan bahwa hubungan antara pengukuran nilai wajar (level 3) dengan *restatements* pada laporan keuangan didorong oleh penyajian kembali yang disebabkan oleh kesalahan dan manipulasi manajerial. **Lin et al., (2017)** berpendapat bahwa sebagian besar transaksi bisnis yang terkait

dengan nilai wajar level 3 bersifat kompleks. Selain itu, nilai wajar level 3 ditentukan oleh kebijaksanaan manajemen, dan dianggap kurang dapat diandalkan daripada nilai wajar level 1 dan level 2 yang didasarkan pada harga pasar yang dapat diamati. Oleh karena itu, manajer yang bersifat oportunis (*self-interested manager*) dapat terdorong untuk melebih-lebihkan masukan level 3 guna memanipulasi posisi dan kinerja keuangan.

Fenomena Enron, Kimia Farma dan Toshiba merupakan beberapa contoh dari perbuatan manajemen perusahaan yang bersifat oportunis. Penyajian kembali akuntansi merupakan bukti dari karakteristik akuntansi yang penuh dengan estimasi dan ketidakpastian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik akuntansi inilah yang dimanfaatkan demi keuntungan sedikit pihak dan mengorbankan banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pelaporan keuangan selalu dipertanyakan.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada seluruh perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode pengamatan tahun 2014-2017. Perusahaan keuangan peneliti pertimbangan karena perusahaan keuangan adalah perusahaan yang paling terlihat eksposur pengukuran nilai wajar pada laporan keuangan. Beberapa penelitian tentang penyajian kembali akuntansi (*restatement*) lebih banyak diasosiasikan dengan karakteristik *corporate governance* perusahaan (**Yuristisia & Lukviarman: 2008; Kusumo & Meiranto: 2014** serta **Marpid: 2016**). Peneliti belum menemukan penelitian tentang asosiasi antara pengukuran nilai wajar (*fair value*) dengan penyajian

kembali akuntansi (*restatement*) untuk konteks Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam penelitian mengenai kualitas pelaporan keuangan dengan mengasosiasikan pengukuran nilai wajar dan keterjadian *restatement* untuk konteks Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti juga mempertimbangkan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol yang berpotensi mempengaruhi keterjadian penyajian kembali (*restatements*) pada penelitian ini. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Variabel kontrol lainnya adalah tingkat leverage perusahaan yang diukur dengan menghitung total hutang perusahaan terhadap total aset perusahaan.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan peneliti pertimbangkan sebagai variabel kontrol karena perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki tingkat kompleksitas transaksi lebih tinggi yang mempengaruhi keterjadian penyajian kembali akuntansi.

Tingkat hutang perusahaan menunjukkan risiko dan sejauh mana perjanjian hutang yang dikenakan pada perusahaan. Dengan demikian, ada kemungkinan keterjadian *misstating* rekening yang lebih tinggi pada perusahaan dengan level hutang yang tinggi. Tingkat hutang dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total aset.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur akuntansi keuangan, khususnya mengenai pengukuran nilai wajar di Indonesia dan kualitas

pelaporan keuangan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam penelitian tentang akuntansi keuangan dengan mempertimbangkan penyajian kembali (*restatement*) sebagai proksi kualitas pelaporan keuangan di Indonesia yang diasosiasikan dengan pengukuran nilai wajar. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah penelitian mengenai kebermanfaatan pengukuran nilai wajar di Indonesia.

Kualitas pelaporan keuangan yang menjadi fokus pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi investor dan analis pasar modal. Sebagaimana tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dalam rapatnya pada tanggal 28 September 2016 adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (IAI, 2016).

Penelitian tentang pengukuran nilai wajar dan kualitas pelaporan keuangan dengan proksi *restatements* ini diharapkan dapat diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, termasuk IAI sebagai penyusun standar akuntansi di Indonesia dalam rangka pengembangan, penyempurnaan, dan pemilihan kebijakan pelaporan keuangan untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, peneliti merumuskan permasalahan tentang ***“Bagaimana Hubungan Antara Pengukuran Nilai Wajar Dengan Penyajian Kembali Laporan Keuangan?”***

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara pengukuran nilai wajar dengan penyajian kembali laporan keuangan sebagai proksi kualitas pelaporan keuangan.

D. Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai literatur akuntansi keuangan, khususnya mengenai pengukuran nilai wajar dan dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan proksi *restatements* di Indonesia.

2) Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi pertimbangan investor dalam memilih keputusan investasi terbaik dan juga pertimbangan bagi analis pasar modal dalam menilai kinerja emiten.

3) Bagi Akademisi

Peneliti berharap melalui penelitian ini, dapat menambah literatur akademis mengenai akuntansi keuangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengukuran akuntansi nilai wajar dan kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory pada dasarnya adalah teori yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara *principal* dengan *agent*. *Principal* merupakan pelaku pemegang saham atau pemilik perusahaan dan *agent* sebagai manajemen perusahaan. **Jensen dan Meckling (1976)** menyatakan hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara *principal* dan *agent* dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Sesuai dengan perjanjian tersebut dapat diasumsikan bahwa beberapa keputusan akan memberikan kewenangan kepada *agent* dalam proses pengambilan keputusan.

Pada praktiknya masalah keagenan dapat terjadi karena dua hal. Pertama, masalah agensi antara manajemen dan pemegang saham (**Jensen dan Meckling, 1976**) yaitu adanya konflik kepentingan antara pihak pemilik perusahaan (*principal*) dan manajer perusahaan (*agent*). Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap perusahaan. Manajer perusahaan yang berperan sebagai *agent* bertanggung jawab untuk meningkatkan keuntungan para pemilik (*principal*), tapi manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya, ketika hal itu terjadi dapat memungkinkan manajer (*agent*) untuk tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (*principal*), sehingga memicu konflik kepentingan antara pemilik (*principal*)

dengan manajer (*agent*). Kedua, adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* sebagai pengelola perusahaan tentunya mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan diwaktu mendatang dibandingkan pemilik (*principal*). Asimetri informasi mempunyai dua tipe sebagai berikut:

1) *Adverse Selection*

Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian dengan pihak lain tersebut apapun bentuknya, dan jika tetap melakukan perjanjian, pihak yang memiliki sedikit informasi tersebut akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi.

2) *Moral Hazard*

Moral Hazard terjadi ketika manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik.

Berdasarkan masalah keagenan tersebut, informasi yang disajikan oleh manajemen (*agent*) dalam laporan keuangan memungkinkan untuk menyesatkan atau dimanipulasi sehingga merugikan *principal* (pemilik) dan pihak-pihak lain yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Sementara itu, standar akuntansi juga memberi keleluasaan (*discretion*) bagi badan usaha untuk memilih perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi badan usaha (Suwardjono, 2005).

Dalam menyusun, menyiapkan, dan menyajikan laporan keuangan dibutuhkan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Namun, dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan masih memungkinkan terjadinya kelalaian untuk mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode sebelumnya. Kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan (*oversights*) atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan (**PSAK No. 25**) yang mengharuskan untuk dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan (*restatements*). **Lin et al., (2017)** menemukan bahwa beberapa penyajian kembali cenderung dikaitkan dengan kompleksitas transaksi, manipulasi yang disengaja serta pengukuran nilai wajar level 3.

Akuntansi nilai wajar merupakan pengukuran berbasis pasar dan bukan pengukuran yang spesifik berbasis entitas. Permasalahan mengenai pengukuran berbasis pasar ini adalah tidak semua asset dan liabilitas itu memiliki pasar sebagai basis perbandingan untuk pengukuran pada laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti mengasumsikan bahwa untuk asset dan liabilitas yang tidak mempunyai pasar sebagai basis perbandingan tersebut kemungkinan mempengaruhi keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*) laporan keuangan.

Akuntansi nilai wajar sebagian besar bergantung pada kebijaksanaan manajerial yang dapat mengurangi kualitas pelaporan keuangan (**Du et al., 2014;**

Lin et al., 2017). Wang (2010) juga memberikan bukti mengenai pengaruh akuntansi nilai wajar terhadap perilaku oportunistik didalam proses penilaian aset antara manajer dengan penilai (*verifier*). Pengukuran nilai wajar level 3 ditentukan oleh kebijaksanaan manajemen, dan dianggap kurang dapat diandalkan daripada nilai wajar level 1 dan level 2 yang didasarkan pada harga pasar yang dapat diamati. Oleh karena itu, manajer yang bersifat oportunistik (*self-interested manager*) dapat terdorong untuk melebih-lebihkan input level 3 guna memanipulasi posisi dan kinerja keuangan (**Lin et al., 2017**).

2. Kualitas Pelaporan Keuangan (*Financial Reporting Quality*)

Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara (**Swardjono, 2005**). Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai entitas pelapor kepada investor sekarang dan investor potensial serta pemberi pinjaman dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas (**IAI, 2016**). Untuk menilai kualitas teknologi laporan keuangan dapat dilihat dari kemampuan teknologi laporan keuangan tersebut dalam memenuhi tujuan pelaporan keuangan.

Pada Bab 3 didalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dijelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi keuangan. Karakteristik kualitatif utama (*primary qualitative characteristics*) laporan keuangan terdiri dari *relevance* dan *faithful representation*. Sementara itu, karakteristik kualitatif peningkatan (*enhancing qualitative characteristics*) laporan

keuangan terdiri dari terbanding (*comparable*), terverifikasi (*verifiable*), tepat waktu (*timely*), dan terpahami (*understandable*).

a) Karakteristik kualitatif utama (*primary qualitative characteristics*)

i. Relevan (*relevance*)

Relevan (*relevance*) dapat diartikan dengan kemampuan informasi yang terdapat didalam laporan keuangan dalam mempengaruhi proses pemilihan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. (Suwardjono, 2005) mendefinisikan relevan (*relevance*) dengan kemampuan informasi untuk membantu pemakai dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pemakai dapat dengan mudah menentukan pilihan. Relevan (*relevance*) adalah kemampuan informasi keuangan pada laporan keuangan untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lain dalam menyusun prediksi-prediksi tentang beberapa munculan (*outcomes*) dari kejadian masa lalu, sekarang, dan masa datang atau dalam mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan-harapannya.

ii. Representasi tepat (*faithful representation*)

Representasi tepat (*faithful representation*) dapat diartikan dengan penyajian informasi keuangan didalam laporan keuangan yang benar-benar mencerminkan keadaan ekonomis dari elemen pada laporan keuangan tersebut. (Suwardjono, 2005) mendefinisikan representasi tepat (*faithful representation*) dengan kesesuaian atau kecocokan antara pengukur atau deskripsi (representasi) dan fenomena yang diukur atau dideskripsi. Dalam akuntansi, fenomena yang ingin direpresentasi adalah kondisi fisis, kondisi keuangan, dan kegiatan

ekonomik badan usaha berupa sumber ekonomik, kewajiban keuangan, dan transaksi atau kejadian yang mengubah sumber ekonomik dan kewajiban tersebut.

Representasi tepat (*faithful representation*) dalam akuntansi menyangkut dua hal yaitu ketepatan deskripsi atau definisional (misalnya aset, kas, piutang, dan kewajiban) dan validitas pengukuran. Ketidaktepatan akan mengurangi atau menghilangkan keterandalan informasi. Pengukuran aset dasar kos adalah tepat kalau penyajian dimaksudkan untuk merepresentasi sisa potensi jasa dan bukan nilai jual. Jadi, validitas pengukuran harus dikaitkan dengan konteks yang dituju oleh pengukuran. (Suwardjono, 2005).

b) Karakteristik kualitatif peningkatan (*enhancing qualitative characteristics*)

Informasi keuangan didalam laporan keuangan dapat ditingkatkan nilainya apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut:

i. Terbanding (*comparable*)

Informasi keuangan didalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan antara satu periode pelaporan dengan periode pelaporan lain serta harus dapat dibandingkan dengan industri sejenis. Suwardjono (2005) mendefinisikan keterbandingan dengan kemampuan informasi untuk membantu para pemakai mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik (misalnya dua perangkat statement keuangan yang merepresentasi kegiatan dua badan usaha).

Dua hal atau lebih dapat dibandingkan kalau mereka mempunyai beberapa karakteristik bersama (*characteristics in common*) sebagai basis

perbandingan. Contoh karakteristik bersama dua perusahaan misalnya adalah aset, pertumbuhan (*growth*), ukuran (*size*), likuiditas dan laba. Perbandingan akan bermakna (*meaningful*) hanya jika kuantitas (*magnitude*) karakteristik bersama dihasilkan dengan dasar, standar, prosedur, atau metoda yang sama. Dalam akuntansi, bukan hanya unit pengukur yang sama yang disyaratkan melainkan definisi yang sama tentang suatu objek. Artinya, pengertian laba bagi perusahaan yang satu harus sama dengan pengertian laba bagi perusahaan lain yang dibandingkan. Keterandalan hasil perbandingan akan berkurang atau hilang kalau dua objek memang tidak dapat diperbandingkan secara bermakna (**Suwardjono, 2005**).

Standar akuntansi dimaksudkan untuk menjamin bahwa kualitas keterbandingan antarbadan usaha tinggi. Sementara itu, standar akuntansi juga memberi keleluasaan (*discretion*) bagi badan usaha untuk memilih perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi badan usaha. Keseragaman menjamin keterbandingan yang tinggi tetapi dapat mengurangi relevansi dan reliabilitas informasi badan usaha secara individual. Oleh karena itu, perlu dicapai keseimbangan antara kebutuhan untuk mencapai keterbandingan yang tinggi tanpa harus mengorbankan relevansi dan reliabilitas (**Suwardjono, 2005**).

ii. Terverifikasi (*verifiable*)

Informasi keuangan didalam laporan keuangan harus dapat diverifikasi agar lebih meyakinkan pengguna atau pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan yang ada didalam laporan keuangan tersebut. **Suwardjono (2005)** menyatakan bahwa keterujian (verifiabilitas) adalah

kemampuan untuk meyakinkan bahwa informasi merepresentasi apa yang dimaksudkan untuk direpresentasi sesuai dengan konsensus atau bahwa cara pengukuran yang dipilih telah diaplikasikan tanpa kesalahan atau bias. Verifikasi lebih berkaitan dengan meminimkan bias dalam proses pengukuran (*measurer bias*) daripada dengan menentukan ketepatan dasar pengukuran (*measurement bias*) seperti kos historis, kos sekarang, daya beli konstan, dan nilai likuidasi yang menentukan ketepatan penyimbolan (*representational faithfulness*).

iii. Tepat waktu (*timely*)

Informasi keuangan didalam laporan keuangan harus disediakan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **Suwardjono (2005)** menjelaskan bahwa ketepatwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Tersedianya informasi lama setelah suatu kejadian yang memerlukan tanggapan atau keputusan berlalu menjadikan informasi tersebut tidak punya nilai lagi. Secara sendiri, ketepatwaktuan tidak membuat informasi menjadi berpaut tetapi kurangnya ketepatwaktuan dapat menyita keberpautan yang melekat pada informasi.

iv. Terpaham (*understandable*)

Informasi keuangan didalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan yang mempunyai kemampuan dan keinginan yang rasional dalam mempelajari informasi didalam laporan keuangan tersebut. **Suwardjono (2005)** menjelaskan bahwa keterpahamian (*understandibility*) adalah kemampuan informasi untuk dapat dicerna maknanya oleh pemakai yang

dipengaruhi oleh pemakai dan informasi itu sendiri. FASB menetapkan kriteria kebermanfaatan atas dasar karakteristik pemakai dan informasi sekaligus sebagai berikut (**SFAC No. 1, prg. 34**) dalam **Suwardjono (2005)**:

The information should be comprehensible to those who have a reasonable understanding of business and economic activities and are willing to study the information with reasonable diligence.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi dibutuhkan keputusan pengukuran yang berdampak pada output karakteristik kualitatif informasi. Kunci utama pengukuran nilai wajar adalah kondisi pasar aktif dan tidak aktif. Dalam kondisi pasar aktif, informasi yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas relevan, reliabel, dapat dibandingkan dan konsistensi. Ketika kondisi pasar tidak aktif, informasi yang disajikan menjadi tidak *fair*, kurang memenuhi kriteria relevan dan reliabel. Komparabilitas juga terganggu karena kemungkinan penggunaan teknik penilaian estimasi input yang berbeda namun tetap dapat memenuhi kualitas konsistensi dengan adanya pengungkapan. Pengukuran ini juga dapat menyebabkan nilai aset menurun dalam kondisi pasar tidak aktif sehingga perlu pertimbangan *cost and benefit* serta materialitas dalam pertimbangan pengambilan keputusan (**Sonoto, 2010**).

3. Penyajian Kembali Laporan Keuangan (*Restatement*)

Definisi penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) umumnya dipandang sebagai koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyajian kembali laporan keuangan dapat terjadi ketika perusahaan, baik secara sukarela atau

diminta oleh auditor atau regulator, merevisi informasi keuangan publik yang sebelumnya dilaporkan. Penyajian kembali laporan keuangan dapat pula didefinisikan sebagai revisi dan publikasi satu atau lebih dari laporan keuangan perusahaan sebelumnya. Penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) ini diperlukan pada saat ditentukan bahwa informasi pada laporan keuangan sebelumnya berisi ketidaktepatan material. Penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) dapat diakibatkan oleh kesalahan akuntansi, ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecurangan, kekeliruan atau kesalahan administrasi yang sederhana. Penyajian kembali akuntansi merupakan bukti dari karakteristik akuntansi yang penuh dengan estimasi dan ketidakpastian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik akuntansi inilah yang dimanfaatkan demi keuntungan sedikit pihak dan mengorbankan banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pelaporan keuangan selalu dipertanyakan.

Lin et al., (2017) menemukan bahwa beberapa penyajian kembali cenderung dikaitkan dengan kompleksitas transaksi, manipulasi yang disengaja serta pengukuran nilai wajar level 3. Akuntansi nilai wajar merupakan pengukuran berbasis pasar dan bukan pengukuran yang spesifik berbasis entitas. Permasalahan mengenai pengukuran berbasis pasar ini adalah tidak semua asset dan liabilitas itu memiliki pasar sebagai basis perbandingan untuk pengukuran pada laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti mengasumsikan bahwa untuk asset dan liabilitas yang tidak mempunyai pasar sebagai basis perbandingan

tersebut kemungkinan mempengaruhi keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*) laporan keuangan.

Berdasarkan kepada teori keagenan (*agency theory*) informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen (*agent*) dalam laporan keuangan memungkinkan untuk menyesatkan atau dimanipulasi sehingga merugikan *principal* (pemilik) dan pihak-pihak lain yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Sementara itu, standar akuntansi juga memberi keleluasaan (*discretion*) bagi badan usaha untuk memilih perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi badan usaha (Suwardjono, 2005).

Penelitian ini termotivasi oleh penemuan Lin *et al.*, (2017) tentang asosiasi antara pengukuran aset nilai wajar level 3 terhadap keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*). Pada penelitian ini, peneliti juga mempertimbangkan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol yang berpotensi untuk mempengaruhi keterjadian penyajian kembali (*restatement*) pada penelitian ini. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari total aset yang dimiliki perusahaan. Variabel kontrol lainnya adalah tingkat leverage perusahaan yang diukur dengan menghitung total hutang perusahaan terhadap total aset perusahaan.

Dalam penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) harus mempertimbangkan konsep materialitas. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi

pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait ukuran atau sifat pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu.

PSAK No. 25 mengelompokkan penyebab utama yang mempengaruhi revisi atau ada 3 jenis *restatements*, yaitu:

a. Perubahan Estimasi Akuntansi (*Changes In Accounting Estimates*)

Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian periodik aset, yang berasal dari penilaian status kini, dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban, yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru (bukan dari koreksi kesalahan). Jadi, estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman.

Entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi akuntansi secara prospektif, sebagai berikut:

- 1) Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait dengan periode perubahan;

- 2) Dampak perubahan estimasi akuntansi, selain perubahan penerapan diatas, diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada:
 - i. Periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu; atau
 - ii. Periode perubahan dan periode mendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya.

Dalam hal pengungkapan perubahan estimasi akuntansi, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan, atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

b. Kesalahan Mendasar (*Fundamental Errors*)

Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung kesalahan yang material, atau tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas tertentu.

Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat, dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu

yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan, atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:

- 1) Tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut; dan
- 2) Secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, dan kecurangan.

Dalam hal koreksi kesalahan material periode lalu, entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan:

- 1) Menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi; atau
- 2) Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal.

Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode kesalahan, entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal dimana penyajian kembali retrospektif adalah praktis (mungkin periode berjalan). Ketika tidak praktis untuk

menentukan dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada semua periode lalu, entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis paling awal.

Dalam hal pengungkapan koreksi kesalahan, entitas harus mengungkapkan:

- 1) Sifat kesalahan periode lalu;
- 2) Jumlah koreksi untuk setiap periode sajian, sepanjang praktis untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh dan LPS dasar dan dilusian;
- 3) Jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal; dan
- 4) Jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi.

Penerapan suatu pengaturan dikatakan tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Untuk suatu periode lalu tertentu, adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan, jika:

- 1) Dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan;

- 2) Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut; atau
- 3) Penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara obyektif mengenai informasi yang:
 - i. Menyediakan bukti atas keadaan yang ada pada tanggal dimana jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan; dan
 - ii. Akan tersedia ketika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dari informasi lain.

c. Perubahan Kebijakan Akuntansi (*Changes In Accounting Policies*)

Perubahan dalam kebijakan akuntansi berarti bahwa entitas pelaporan telah menukar satu prinsip akuntansi dengan yang lain. Kebijakan akuntansi mencakup prinsip-prinsip akuntansi, basis, konvensi, aturan dan praktik yang digunakan. Misalnya, perubahan dalam biaya inventori dari rata-rata tertimbang (*weighted averaged*) ke FIFO akan menjadi perubahan dalam kebijakan akuntansi. Sama halnya dengan perubahan dalam akuntansi untuk biaya pinjaman dari kapitalisasi ke pembebanan langsung.

Dalam hal kebijakan akuntansi diatur dalam sebuah PSAK spesifik, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAK spesifik tersebut. Namun, apabila tidak ada PSAK spesifik terkait kebijakan akuntansi, maka

manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang akan menghasilkan informasi yang relevan dan andal (menyajikan jujur, mencerminkan substansi ekonomi, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap).

Entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas entitas. Hal tersebut dikarenakan pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode lain sehingga penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten sangat diperlukan.

Apabila entitas mengubah sebuah kebijakan akuntansi yang dikarenakan penerapan awal suatu PSAK maka perubahan kebijakan akuntansi tersebut harus mengikuti ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Dalam hal tidak ada ketentuan transisi, atau perusahaan melakukan perubahan akuntansi secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan kebijakan akuntansi tersebut secara retrospektif.

Penerapan retrospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Sedangkan penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi.

Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan:

- 1) Saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal;
- 2) Jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.

Ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif, maka entitas: (i) menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal dimana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan, dan (ii) membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu.

Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak kumulatif dari, pada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitas menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal.

Entitas menerapkan pengungkapan berikut terkait perubahan kebijakan akuntansi:

- 1) Sifat dari perubahan kebijakan akuntansi;

- 2) Alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan;
- 3) Jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian, sepanjang praktis : (i) penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh; dan (ii) penyesuaian LPS dasar dan dilusian;
- 4) Jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan, sepanjang praktis; dan
- 5) Keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan, jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu, atau untuk periode-periode sebelum periode-periode tersebut disajikan.

4. Akuntansi Nilai Wajar (*Fair Value Accounting*)

1) Konsep Nilai Wajar

Swardjono (2005), mendefinisikan *fair value* adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yang berkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan. **PSAK No. 68** Pengukuran Nilai Wajar mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran yang spesifik atas entitas. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi pertukaran terjadi dalam suatu transaksi teratur (*orderly transaction*) di pasar utama (*principal market*), atau jika tidak ada, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) (**PSAK No. 68**).

Dalam hal pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan, memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya. Hal ini memperhitungkan penggunaan yang secara fisik dimungkinkan (*physically possible*), secara hukum diizinkan (*legally permissible*), dan layak secara keuangan (*financially feasible*). Penggunaan tertinggi dan terbaik juga menetapkan premis penilaian (*valuation premise*), yang digunakan untuk mengukur nilai wajar (**PSAK No. 68**).

PSAK 68 juga menetapkan hierarki nilai wajar yang mengkategorikan input kedalam tiga level. Teknik penilaian yang digunakan dalam mengukur nilai wajar memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan (**level 1**) dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi (**level 3**). Input tersebut dikategorikan dalam tiga level hierarki nilai wajar, yaitu:

- a. **Input Level 1**, yaitu harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Penekanan pada level 1 adalah untuk

menentukan kedua hal sebagai berikut: (i) pasar utama atau jika tidak ada pasar yang paling menguntungkan; dan (ii) *executable* (transaksi dapat dilakukan pada harga tersebut pada tanggal pengukuran).

Contohnya: harga saham di bursa saham.

- b. **Input Level 2**, yaitu input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Contohnya: (i) swap suku bunga *received-fixed, pay-variable* berdasarkan: [suku bunga swap antar bank (LIBOR), kurva imbal hasil yang didenominasi dalam mata uang asing, tingkat bunga prima bank yang spesifik]; (ii) opsi tiga tahun atas saham yang diperdagangkan; (iii) perjanjian lisensi; (iv) persediaan barang jadi di gerai ritel; dll.

- c. **Input Level 3**, yaitu input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Contohnya: (i) *long-dated currency swap*; (ii) opsi tiga tahun atas saham yang diperdagangkan (volatilitas historis); (iii) swap suku bunga (tidak mengikat); (iv) liabilitas aktivitas purnaoperasi yang diambil alih dalam kombinasi bisnis; dan (v) unit penghasil kas: perkiraan keuangan contohnya (arus kas atau laba rugi) yang dikembangkan menggunakan data milik entitas sendiri.

2) Pengukuran Nilai Wajar

Ada tiga teknik pengukuran *fair value* aset dan liabilitas yang diperkenankan oleh **PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar** yaitu:

a. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Dalam pendekatan ini, nilai wajar diukur berdasarkan harga pasar atau informasi relevan lain yang dihasilkan dari transaksi di pasar. Hal ini termasuk harga aset (liabilitas) sejenis yang ada di pasar, dan metode penilaian lain yang konsisten dengan pendekatan pasar. Urutan yang digunakan jika nilai wajar menggunakan pendekatan pasar adalah, pertama harga pasar aset (liabilitas) pada saat pelaporan, jika tidak terdapat harga pasar aset (liabilitas) maka menggunakan harga pasar aset (liabilitas) sejenis, jika tidak terdapat harga pasar aset (liabilitas) sejenis maka menggunakan model yang konsisten dengan pendekatan pasar (contohnya model *matrix pricing*, dll).

b. Pendekatan Penghasilan (*Income Approach*)

Pendekatan ini menggunakan teknik penilaian untuk mengubah nilai masa depan (contohnya aliran kas atau laba) ke nilai kininya terdiskonto (*discounted*). Pengukuran nilai wajar dalam pendekatan ini menggunakan dasar nilai yang dilihat dari harapan pasar kini atas nilai aset (liabilitas) masa depan. Pendekatan ini termasuk menggunakan nilai kini (*present value, option pricing*).

c. Pendekatan Kos (*Cost Approach*)

Pendekatan kos didasarkan pada jumlah sumber daya yang diperlukan untuk mengganti kapasitas jasa aset, sering disebut juga pendekatan kos pengganti kini (*current replacement cost*). Dalam perspektif *fair value*, pendekatan kos

adalah jumlah yang diterima oleh partisipan pasar (penjual) dari aset yang setara dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan pada biaya yang harus ditanggung oleh partisipan pasar (pembeli) untuk memperoleh atau membangun aset pengganti yang memiliki manfaat sebanding, disesuaikan dengan tingkat keusangan secara teknik dan ekonomis.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Hasil penelitian
1	Lin <i>et al.</i> , 2017	Perusahaan dengan proporsi penggunaan aset nilai wajar level 3 yang besar cenderung melakukan penyajian kembali laporan keuangan (<i>restatements</i>).
2	Sonoto; 2010	Dalam kondisi pasar aktif, informasi yang dihasilkan oleh pengukuran nilai wajar dapat memenuhi kualitas relevan, reliabel, dapat dibandingkan dan konsistensi. Ketika kondisi pasar tidak aktif, informasi yang disajikan oleh pengukuran nilai wajar menjadi tidak <i>fair</i> , kurang memenuhi kriteria relevan dan reliabel.
3	Sonbay; 2010	Penggunaan <i>historical costing</i> dipandang akan mengurangi aspek kualitas relevansi, sehingga laporan keuangan tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu <i>fair value</i> muncul untuk mengatasi kekurangan <i>historical cost</i> . Namun <i>fair value</i> tidak dapat sepenuhnya berguna untuk pengambilan keputusan karena tidak memiliki reliabilitas.
4	Sodan; 2015	Perusahaan dan bank yang menggunakan pengukuran nilai wajar pada laporan keuangan memiliki kualitas <i>earning agregate (aggregate earning quality)</i> yang rendah.
5	Du <i>et al.</i> , 2014	Pengukuran nilai wajar ketika ada perubahan dalam kondisi pasar melibatkan pertimbangan manajemen yang substansial dan kemungkinan kesalahan estimasi dan manipulasi.
6	Fiechter ; 2011	Bank menerapkan <i>FVO (fair value option)</i> untuk mengurangi ketidakcocokan akuntansi menunjukkan volatilitas laba yang lebih rendah daripada bank lain.
7	Linsmeier; 2011	Pengukuran nilai wajar paling berkorelasi dengan eksposur bank terhadap suku bunga dan risiko kredit — dua eksposur risiko utama yang menyebabkan kegagalan bank di tiga krisis finansial terakhir.
8	Song <i>et al.</i> ; 2010,	Relevansi nilai wajar level 1 dan level 2 bernilai lebih

		besar daripada relevansi nilai wajar level 3. Selain itu, relevansi nilai dari nilai wajar terutama level 3 lebih besar untuk perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat. Secara keseluruhan, hasil penelitian Song <i>et al.</i> , (2010) mendukung relevansi pengukuran nilai wajar berdasarkan FAS No. 157 , tetapi mekanisme <i>corporate governance</i> yang lebih lemah dapat mengurangi relevansi nilai ini.
9	Wang; 2010	Akuntansi nilai wajar mempengaruhi perilaku oportunistik didalam proses penilaian aset antara manajer dengan penilai (<i>verifier</i>).
10	Cristea; 2015	Nilai wajar adalah pengukuran yang paling relevan karena mencerminkan realitas perdagangan saat pengukuran.

Pengukuran nilai wajar dianggap memiliki relevansi nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pengukuran kos historis. Namun, pengukuran nilai wajar memiliki reliabilitas yang tidak lebih baik dibandingkan dengan pengukuran kos historis. Hal tersebut dikarenakan kelemahan dari pengukuran nilai wajar yang belum memiliki nilai pasar sebagai basis perbandingan untuk semua nilai asset dan liabilitas.

Pengukuran nilai wajar terdiri dari 3 level pengukuran. Level 1 untuk asset dan liabilitas yang memiliki pasar aktif, contohnya transaksi di bursa saham. Level 2 untuk asset dan liabilitas yang tidak memiliki pasar aktif, namun masih bisa untuk diobservasi, contohnya swap suku bunga *received-fixed, pay-variable* berdasarkan: [suku bunga swap antar bank (LIBOR), kurva imbal hasil yang didenominasi dalam mata uang asing, tingkat bunga prima bank yang spesifik]. Level 3 untuk asset dan liabilitas yang tidak dapat diobservasi, contohnya *goodwill*.

Pengukuran nilai wajar asset level 3 yang tidak dapat diobservasi berkemungkinan mempengaruhi keterjadian penyajian kembali akuntansi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (**Lin et al., 2017**) tentang asosiasi antara pengukuran asset nilai wajar level 3 dengan keterjadian penyajian kembali akuntansi untuk konteks Indonesia.

C. Pengembangan Hipotesis

Pengukuran nilai wajar terdiri dari 3 level pengukuran. Level 1 menggunakan input yang dapat diamati dari harga pasar yang dikutip di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang sama. Level 2 menggunakan input yang dapat diamati dari harga pasar yang berlaku di pasar aktif untuk aset atau kewajiban serupa, harga pasar yang dikutip untuk aset atau kewajiban identik atau sejenis di pasar yang tidak aktif, dan input yang menguatkan pasar lainnya. Sedangkan, level 3 menggunakan input yang tidak teramati dan dihasilkan oleh perusahaan untuk memperkirakan nilai wajar. Misalnya, manajer dapat memperkirakan nilai wajar dengan menggunakan nilai arus kas masa depan yang didiskontokan. Ini akan memerlukan proyeksi arus kas masa depan, input level 3, dan masukan lainnya, seperti suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan kredit (**Lin et al., 2017**).

Akuntansi nilai wajar merupakan pengukuran berbasis pasar dan bukan pengukuran yang spesifik berbasis entitas. Permasalahan mengenai pengukuran berbasis pasar ini adalah tidak semua asset dan liabilitas itu memiliki pasar sebagai basis perbandingan untuk pengukuran pada laporan keuangan. Dengan demikian, peneliti mengasumsikan bahwa untuk asset dan liabilitas (level

3) yang tidak mempunyai pasar sebagai basis perbandingan tersebut kemungkinan mempengaruhi keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*) laporan keuangan.

Definisi penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) umumnya dipandang sebagai koreksi yang dilakukan terhadap laporan keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penyajian kembali laporan keuangan dapat terjadi ketika perusahaan, baik secara sukarela atau diminta oleh auditor atau regulator, merevisi informasi keuangan publik yang sebelumnya dilaporkan. Penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) ini diperlukan pada saat ditentukan bahwa informasi pada laporan keuangan sebelumnya berisi ketidaktepatan material. Penyajian kembali laporan keuangan (*restatement*) dapat diakibatkan oleh kesalahan akuntansi, ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecurangan, kekeliruan atau kesalahan administrasi yang sederhana. Penyajian kembali akuntansi merupakan bukti dari karakteristik akuntansi yang penuh dengan estimasi dan ketidakpastian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik akuntansi inilah yang dimanfaatkan demi keuntungan sedikit pihak dan mengorbankan banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pelaporan keuangan selalu dipertanyakan.

Berdasarkan masalah keagenan, informasi yang disajikan oleh manajemen (*agent*) dalam laporan keuangan memungkinkan untuk menyesatkan atau dimanipulasi sehingga merugikan *principal* (pemilik) dan pihak-pihak lain yang menggunakan informasi dalam laporan keuangan. Sementara itu, standar

akuntansi juga memberi keleluasaan (*discretion*) bagi badan usaha untuk memilih perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi badan usaha (Suwardjono, 2005). Lin *et al.*, (2017) menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi penggunaan aset nilai wajar level 3 yang besar cenderung melakukan penyajian kembali laporan keuangan (*restatements*). Sonoto (2010) menjelaskan bahwa dalam kondisi pasar aktif, informasi yang dihasilkan oleh pengukuran nilai wajar dapat memenuhi kualitas relevan, reliabel, dapat dibandingkan dan konsistensi. Ketika kondisi pasar tidak aktif, informasi yang disajikan oleh pengukuran nilai wajar menjadi tidak fair, kurang memenuhi kriteria relevan dan reliabel. Du *et al.*, (2014) menjelaskan bahwa pengukuran nilai wajar ketika ada perubahan dalam kondisi pasar melibatkan pertimbangan manajemen yang substansial dan kemungkinan kesalahan estimasi dan manipulasi. Wang (2010) menemukan bahwa akuntansi nilai wajar mempengaruhi perilaku oportunistik didalam proses penilaian aset antara manajer dengan penilai (*verifier*). Cristea (2015) menyatakan bahwa nilai wajar adalah pengukuran yang paling relevan karena mencerminkan realitas perdagangan saat pengukuran.

Pengukuran nilai wajar dianggap memiliki relevansi nilai yang lebih baik dibandingkan dengan pengukuran kos historis. Namun, pengukuran nilai wajar memiliki reliabilitas yang tidak lebih baik dibandingkan dengan pengukuran kos historis. Hal tersebut dikarenakan kelemahan dari pengukuran nilai wajar yang belum memiliki nilai pasar sebagai basis perbandingan untuk semua nilai asset dan liabilitas.

Pengukuran nilai wajar terdiri dari 3 level pengukuran. Level 1 menggunakan input yang dapat diamati dari harga pasar yang dikutip di pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang sama. Level 2 menggunakan input yang dapat diamati dari harga pasar yang berlaku di pasar aktif untuk aset atau kewajiban serupa, harga pasar yang dikutip untuk aset atau kewajiban identik atau sejenis di pasar yang tidak aktif, dan input yang menguatkan pasar lainnya. Sedangkan, level 3 menggunakan input yang tidak teramati dan dihasilkan oleh perusahaan untuk memperkirakan nilai wajar. Misalnya, manajer dapat memperkirakan nilai wajar dengan menggunakan nilai arus kas masa depan yang didiskontokan. Ini akan memerlukan proyeksi arus kas masa depan, input level 3, dan masukan lainnya, seperti suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan kredit (Lin et al., 2017).

Untuk melihat bagaimana fenomena penyajian kembali akuntansi (*restatement*) di Indonesia yang diasosiasikan dengan pengukuran nilai wajar peneliti merumuskan hipotesis pertama dan kedua sebagai berikut:

H₁: proporsi pengukuran nilai wajar level 1 tidak berpengaruh terhadap terjadinya penyajian kembali (restatement) pada laporan keuangan tahun berikutnya

H₂: proporsi pengukuran nilai wajar level 2 tidak berpengaruh terhadap terjadinya penyajian kembali (restatement) pada laporan keuangan tahun berikutnya

Akuntansi nilai wajar sebagian besar bergantung pada kebijaksanaan manajerial yang dapat mengurangi kualitas laporan keuangan (Du et al., 2014;

Lin et al., 2017). Pengukuran nilai wajar level 3 yang menggunakan asumsi atau harapan manajemen sendiri, cenderung bersifat kompleks dan diskresioner yang menyebabkan kesulitan bagi auditor untuk melakukan verifikasi. Nilai wajar level 3 mungkin juga mengandung kesalahan pengukuran yang signifikan dan menyebabkan manipulasi manajerial (**Lin et al., 2017**). Penyajian kembali akuntansi merupakan bukti dari karakteristik akuntansi yang penuh dengan estimasi dan ketidakpastian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik akuntansi inilah yang dimanfaatkan demi keuntungan sedikit pihak dan mengorbankan banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pelaporan keuangan selalu dipertanyakan.

Lin et al., (2017) menemukan bahwa hubungan antara pengukuran nilai wajar (level 3) dengan *restatement* pada laporan keuangan didorong oleh penyajian kembali yang disebabkan oleh kesalahan dan manipulasi manajerial. **Lin et al., (2017)** berpendapat bahwa sebagian besar transaksi bisnis yang terkait dengan nilai wajar level 3 bersifat kompleks. Selain itu, nilai wajar level 3 ditentukan oleh kebijaksanaan manajemen, dan dianggap kurang dapat diandalkan daripada nilai wajar level 1 dan level 2 yang didasarkan pada harga pasar yang dapat diamati. Oleh karena itu, manajer yang bersifat oportunis (*self-interested manajer*) dapat terdorong untuk melebih-lebihkan input level 3 guna memanipulasi posisi dan kinerja keuangan. Penelitian (**Lin et al., 2017**) menemukan bahwa keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*) diasosiasikan dengan aset nilai wajar level 3.

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti merumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini:

H₃: proporsi pengukuran nilai wajar level 3 berpengaruh terhadap keterjadian penyajian kembali (restatement) pada laporan keuangan tahun berikutnya

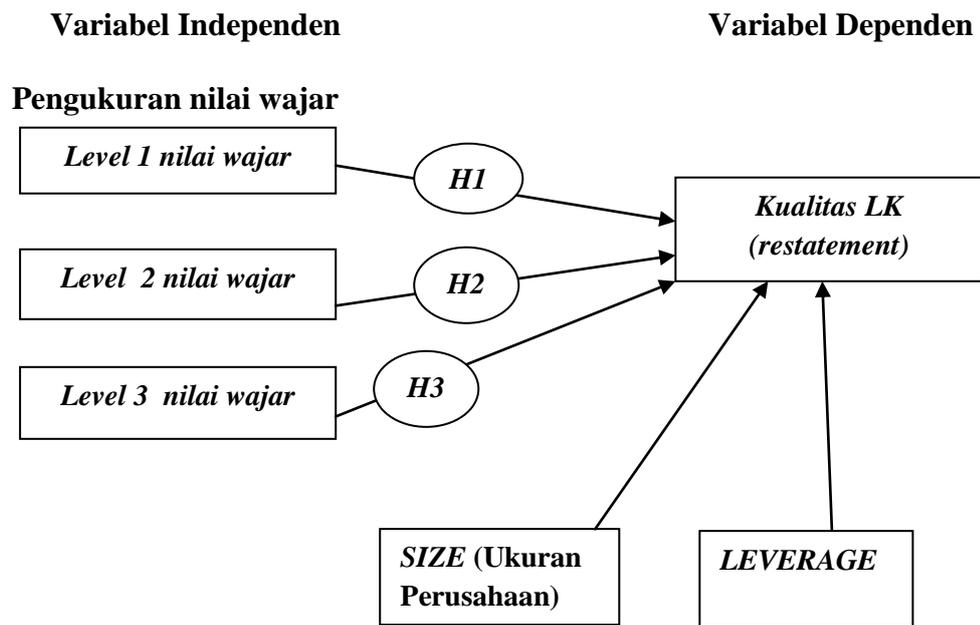
D. Kerangka Konseptual

Penelitian (**Lin et al., 2017**) menemukan bahwa keterjadian penyajian kembali akuntansi (*restatement*) diasosiasikan dengan aset nilai wajar level 3. **Wang (2010)** juga memberikan bukti mengenai pengukuran nilai wajar yang berpengaruh terhadap perilaku oportunistik dalam hal penilaian aset antara manajer dan penilai (*verifier*). Pengukuran nilai wajar merupakan pengukuran yang berbasis pasar. Namun, tidak semua aset dan liabilitas mempunyai pasar sebagai pembanding dalam hal pengukuran pada laporan keuangan yang kemungkinan besar mempengaruhi penyajian kembali akuntansi (*restatement*).

Penyajian kembali akuntansi merupakan bukti dari karakteristik akuntansi yang penuh dengan estimasi dan ketidakpastian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristik akuntansi inilah yang dimanfaatkan demi keuntungan sedikit pihak dan mengorbankan banyak pihak yang berkepentingan dengan informasi keuangan pada laporan keuangan. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pelaporan keuangan selalu dipertanyakan. Pada penelitian ini, peneliti juga mempertimbangkan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol yang berpotensi mempengaruhi keterjadian penyajian kembali (*restatements*) pada penelitian ini. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan yang diukur dengan menjumlahkan nilai logaritma natural dari

total aset yang dimiliki perusahaan. Variabel kontrol lainnya adalah tingkat leverage perusahaan yang diukur dengan menghitung total hutang perusahaan terhadap total aset perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti menggambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil empiris penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai aset dan liabilitas nilai wajar level 3 yang tingkat reliabilitasnya lebih rendah dibandingkan dengan aset dan liabilitas nilai wajar level 1 dan level 2 tidak bisa menjelaskan keterjadian *restatement*. Sementara itu, aset dan liabilitas nilai wajar level 2 terbukti tidak mempengaruhi keterjadian *restatement*. Hasil penelitian ini menambah literatur akuntansi keuangan mengenai kebermanfaatan pengukuran nilai wajar untuk konteks pelaporan keuangan di Indonesia. Kompleksitas perusahaan yang diproksikan dengan logaritma natural total aset dan leverage yang berkemungkinan mempengaruhi keterjadian *restatement* tidak terbukti secara statistik. Pengukuran dengan menggunakan nilai wajar dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Akuntansi nilai wajar memang diakui tidak lebih baik reliabilitasnya dibandingkan dengan akuntansi kos historis. Hasil penelitian ini harus diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan, termasuk IAI sebagai penyusun standar akuntansi di Indonesia dalam rangka pengembangan, penyempurnaan, dan pemilihan kebijakan pelaporan keuangan untuk menjamin kualitas pelaporan keuangan di Indonesia.

B. KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu, sampel perusahaan yang digunakan pada penelitian ini hanya perusahaan keuangan. Kemungkinan besar pengukuran nilai wajar akan berbeda antara perusahaan keuangan dengan perusahaan non-keuangan. Masih ada variabel lain dari penelitian terdahulu tentang keterjadian *restatement* dengan hasil yang belum sama atau berbeda-beda yang belum diujikan dalam penelitian ini. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat memilih sampel yang tepat untuk diuji. Namun perlu disadari bahwa metode *purposive sampling* ini berakibat pada lemahnya validasi eksternal atau kurangnya generalisasi dari hasil penelitian ini.

C. SARAN

Untuk penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan sampel dengan membandingkan pengukuran nilai wajar pada perusahaan keuangan perusahaan non-keuangan. Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan variabel lain yang berkemungkinan mempengaruhi keterjadian *restatement*. Untuk penelitian selanjutnya bisa mempertimbangkan informasi tambahan yang menjadi penyebab sebuah perusahaan melakukan *restatement*.